



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2019**

***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2019***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone pada tahun 2019 termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 4 indikator kinerja utama, terdapat 4 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Bone, 2 Februari 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Bone

DR.H. A. SUMARDI SUAIB, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud dan Tujuan	2
1.3.Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4.Isu Strategis.....	2
1.5.Inovasi Pelayanan Publik.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1.Rencana Strategis	16
2.1.1.Visi	16
2.1.1.Misi	16
2.2.Indikator Kinerja Utama	20
2.3.Perjanjian Kinerja 2018	21
2.4.Rencana Anggaran Tahun 2018	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada

Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor No. 05 Tahun 2014, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5) ditetapkan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone*

Dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) *Perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, orpol dan kemasyarakatan dan ketahanan nasional.*
- 2) *Pengoordinasian penyusunan perencanaan kesbang meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, orpol, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi.*
- 3) *Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesbang meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, orpol, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi .*
- 4) *Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bone dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas selain tugas pemerintahan umum dan politik.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik beserta jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ditetapkan dalam *Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.*

Badan Kesatuan Bangsa memiliki susunan organisasi sebagaimana terlampir.

Tabel 1. Jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2019

No.	Pendidikan	Jumlah	No	Gol.	Jumlah	No	Jabatan	Jumlah
1.	SD	-	1.	I	-	1.	Struktural	15
2.	SMP	-	2.	II	2		- Eselon II = 1 orang	
3.	SMA	2	3.	III	14		- Eselon III = 5 orang	
4.	Diploma 1	-	4.	IV	7		- Eselon IV = 8 orang	
5.	Diploma 2	-				2.	Fungsional	
6.	Sarmuda/D3	-						
7.	Strata 1	14						
8.	Strata 2	7						
						3.	Staf	8
Jumlah		23	Jumlah		23	Jumlah		23

1.4 ISU STRATEGIS

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone merupakan sasaran utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2013-2018*, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan aspek strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, terdiri dari :

a) Faktor Internal

Kekuatan organisasi secara internal, yaitu :

- Kewenangan yang besar dengan dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan orpol, kemasyarakatan dan ketahanan nasional;
- Adanya pedoman kerja organisasi yang jelas dan terstruktur berupa Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan untuk meningkatkan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Kelemahan organisasi secara internal, yaitu :

- Masih terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan kemampuan SDM yang ada, khususnya dalam hal :
 - Pelaksanaan terhadap administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah,

- Pelaksanaan konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan beserta laporan capaian kinerja dan keuangan, dan juga pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan aparatur, khususnya ruangan gedung kantor beserta perlengkapan meubeulernya (meja dan kursi kerja), dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat);
- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang nilainya sekitar 0,25 % dari total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Bone dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b) Faktor Eksternal

Kekuatan organisasi secara eksternal, yaitu :

- Dukungan dan komitmen secara penuh dari Bupati Bone selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone;
- Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Eksternal lainnya, baik dengan BPK-RI, BPKP, Muspida dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik propinsi;

Kelemahan organisasi secara eksternal, yaitu :

- Inkonsistensi beberapa peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat dalam konteks otonomi/kewenangan daerah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang beberapa kali mengalami perubahan yang cukup cepat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;

Terbatasnya peraturan daerah/peraturan kepala daerah, yang mengatur secara lebih terinci terkait dengan prosedural teknis implementasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai

berikut:

- a. Belum memadai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA.
- b. Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala lokal.
- c. Terbatasnya kemampuan SDM sehingga pendidikan politik tidak merataelum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi informasi yang tidak terbendung.
- d. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Bela Negara

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI :

Visi Pembangunan Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah:

MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan disasar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi:

1. Misi Kesatu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Misi Kedua : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat;

Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 : *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);*

Tujuan 1:

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik.

Misi 2 : *Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat*

Tujuan 2:

Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan

Tujuan 3:

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3
Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tujuan 1	Cakupan konflik bernuansa SARA yang tertangani (%)	%	100	100
Tujuan 2	Persentase keikutsertaan aparat dan elemen masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara (%)	%	5,6	6,8
	Cakupan Ormas dan Orpol yang mendapatkan pembinaan (%)	%	80	80
	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif (%)	%	80	80
	Persentase Ormas/ LSM yang berpartisipasi aktif (%)	%	25	25
Tujuan 3	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Nilai	CC	B

Sasaran Dan Indikator Kinerja

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yaitu :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik;
- Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol
- Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara
- Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat

Indikator Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif
- Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan
- Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif
- Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara
- Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani
- Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Sasaran 1	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	26%	
	Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	Orpol/Ormas	35 Orpol/Ormas	
Sasaran 2	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	82%	
	Prosentase Keikutsertaan	Persen	6, 8 %	

	Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara			
Sasaran 3	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani	Persen	100%	
Sasaran 4	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Nilai	B	

Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone

SASARAN	PROGRAM STRATEGIS
Sasaran 1	Program Pendidikan Politik Masyarakat
Sasaran 2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara
Sasaran 3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Sasaran 4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Program Penunjang Pemerintahan Umum

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini

memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Nilai	B
2	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	26%
		Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	Orpol/Ormas	35 Orpol/Ormas
3	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	82%
		Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	Persen	6, 8 %
4	Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani	Persen	100%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.3 IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja
1.	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah Ormas/ LSM yang aktif}}{\text{Jumlah Ormas Keseluruhan tahun tersebut}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan yang berperan aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Konflik bernuansa SARA yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah konflik yang bernuansa SARA}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. **6.000.000.000,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Rencana Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.344.822.777,-	24,33
2	Belanja Langsung	Rp.6.000.000.000,-	95,77
Jumlah		Rp. 8.344.822.777,-	100%

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
				KEUANGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	970,723,000	99, 00 %
		Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	494,390,000	
		Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Administrasi Bantuan Partai Politik	32,313,000	
		Kegiatan Bimtek Pengelolaan Administrasi PertanggungJawaban Dana Parpol	130,000,000	
		Kegiatan Pemantauan dan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019	260,650,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	% KEUANGAN
1	2	3	4	5
	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif (%)	Kegiatan Peningkatan Kapasitas LSM dan Ormas	53,370,000	
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif (%)	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	123,600,000	
		Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan	59,000,000	
		Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	64,600,000	
	Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara	529,587,000	
		Pelatihan Bela Negara	507,887,000	
		Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi Daerah	21,700,000	
Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Konflik bernuansa SARA yang tertangani (%)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3,460,832,240	
		Penyediaan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	464,600,000	
		Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	86,200,000	
		Rakor Polkam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	443,200,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	% KEUANGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik		Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial	559,232,240	
		Peningkatan Kerjasama dan Sinergitas Dalam Pemeliharaan kantrantibmas	1,650,400,000	
		Satgas Daerah Sapu Bersih Pungli	257,200,000	
	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	643,825,500	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,110,000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,300,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	128,510,400	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	175,000,000	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	267,905,100	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211,132,260	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50,000,000	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	76,582,260	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	%
				KEUANGAN
1	2	3	4	5
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,000,000	
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	35,000,000	
		Program Penunjang Pemerintahan Umum	25,300,000	
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	25,300,000	
TOTAL			6,000,000,000	

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. **6.000.000.000,-**dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan besaran 100 % Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol yaitu sebesar 99% Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara sebesar 96 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2019. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$> 100 \%$	Baik Sekali
2	$76 \% \leq 100 \%$	Baik
3	$66 \% \leq 75 \%$	Cukup
4	$51 \% \leq 65 \%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018–2023. Dalam Renstra terdapat 4 (Empat) sasaran dengan 6 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 (dua) indikator kinerja , sasaran 3 terdapat

1 (satu) indikator kinerja dan sasaran 4 terdapat 1 (satu) indikator kinerja.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	2	BS = B = SK = 100% C = K =
2.	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	2	BS = B = SK = 100% C = K =
3.	Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	BS = B = SK = 100% C = K =
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	1	BS = 100% B = SK = C = K =
	JUMLAH		BS = B = SK = C = K =

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019 pada intinya mencakup data realisasi dan evaluasi hasil capaian kinerja organisasi pada tahun 2019. Hal ini diperoleh melalui analisis dan perbandingan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Tahapan evaluasi capaian kinerja dari tiap sasaran strategis, meliputi :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2019;
2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2019 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;

3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2019 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2018-2023;
4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian target kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2019, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan ketujuh tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut

B.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS PERTAMA	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol			
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Keterangan
1. Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif.	26%	26%	100	Pengukuran berdasarkan Data Capaian Kinerja Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2019
2. Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	35 Orpol/Ormas	35 Orpol/Ormas	100	
SASARAN STRATEGIS KE-DUA	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara			
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Keterangan
1. Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	82%	82%	100	Pengukuran berdasarkan Data Capaian Kinerja Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bone tahun 2019
2. Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara.	6,8 %	6,8 %	100	
SASARAN STRATEGIS KE-TIGA	Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat			
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Keterangan
1. Cakupan Konflik yang bernuansa SARA yang tertangani	100%	100%	100	Pengukuran Berdasarkan Data Capaian Kinerja Bidang Kewaspadaan

				Nasional Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Bone Tahun 2019
SASARAN STRATEGIS KE-EMPAT	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik			
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Keterangan
Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC <i>Catatan : Berdasarkan Nilai Rata-rata dari Persentase Pencapaian Target Kinerja Kegiatan dalam Program Pelayanan Adm. Perkantoran</i>	B	125	Pengukuran realisasi berdasar pada persentase rata-rata pencapaian target output/outcome dari masing- masing kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran

Dari Keempat sasaran dengan 6 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	2	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah	2	100

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 2			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	2	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah	2	100
Sasaran 3			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah	1	100
Sasaran 4			
1.	Baik Sekali	1	125
2.	Baik		
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah	1	125

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (Empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja, diketahui bahwa indikator sasaran yang ke – 4 yang berpredikat Baik Sekali yang melawati target dari target CC menjadi B, 3 (tiga) indikator sasaran atau persentase keseluruhan sebesar 100% dengan predikat setiap sasaran Baik, tidak ada indikator sasaran bernilai cukup, kurang dan sangat kurang

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bone tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1: ” Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol ”

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol*

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
a.	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif.	26%	26%	100%
b.	Cakupan ormas dan Orpol yang mendapatkan pembinaan	80 Ormas 11 Orpol	80 Ormas 11 Orpol	100% 100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif dengan capaian sesuai **target** yang telah ditetapkan dimana jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi aktif sebanyak 26% ormas dari total 80 LSM/Ormas.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Cakupan ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan **telah mencapai target** yang telah ditetapkan dimana jumlah ormas 80% orpol dimana jumlah orpol yang mendapat pembinaan 11 dari jumlah 11 orpol yang mendapatkan bantuan. 11 Parpol dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan Baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol*

Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No.	Indikator Kinerja	REALISASI		
		2017	2018	2019
1.	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	-	25%	26%
2.	Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	-	79%	80%

Indicator pertama dimana Realisasi pada tahun 2018 mencapai 25% dari target 24%, mengalami kenaikan sebesar 1 poin dari tahun 2017 (tahun sebelumnya)

Indicator kedua dimana Realisasi pada tahun 2019 mencapai 26% dari target 25%, mengalami kenaikan sebesar 1 poin dari tahun 2018 (tahun sebelumnya)

c. Perbandingan dengan target akhir renstra

No.	Indikator Kinerja	REALISASI		
		2019	2023	%
1.	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	26	30	1,2
2.	Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	80	96	1,2%

Berdasarkan perbandingan dengan akhir target renstra diatas, prosentase ormas 1,2 % menunjukkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 masih mencapai 1,2 persen dari target akhir Renstra di tahun 2023. Dan untuk cakupan ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan 1,2 % menunjukkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 mencapai 1,2 persen dari target renstra tahun 2023.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif.

2. Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan

Meningkatnya pendidikan politik masyarakat dan penguatan Kapasitas LSM dan Ormas dipengaruhi oleh peningkatan keikutsertaan partai politik dan pembinaan dan pendidikan politik masyarakat yang juga mengalami peningkatan atau dengan kata lain mencapai target.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	100	98,61	
	Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	100	86,64	
	TOTAL	100	92.625	7,375

tabel diatas... menunjukkan bahwa tingkat efisiensi sebesar 7,38 yang menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran.

4. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan

N O.	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	KEUANGAN
	2	3	4	5	6

N O.	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	KEUANGAN
	2	3	4	5	6
1	Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	970,723,000	841,065,650	86.64
		Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	94,390,000	399,028,400	80.71
		Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Administrasi Bantuan Partai Politik	32,313,000	31,229,000	96.65
		Kegiatan Bimtek Pengelolaan Administrasi PertanggungJawaban Dana Parpol	130,000,000	129,191,250	99.38
		Kegiatan Pemantauan dan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019	260,650,000	228,987,000	87.85
2	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Kegiatan Peningkatan Kapasitas LSM dan Ormas	53,370,000	52,630,000	98.61

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone untuk sasaran strategis pertama telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dimana pencapaian target tahun 2019 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019.

Namun belum dapat dibandingkan dengan target di tahun lalu dikarenakan indikator ini baru pada Renstra 2018-2023.

5. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain masih kurangnya pemahaman lembaga dalam mengaktifkan lembaga yang dimilikinya serta dalam persoalan orpol terakit tentang hak untuk memberikan suaranya pada pemilihan umum sehingga menurut data pemilih dari KPU pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2019 belum maksimal atau belum mencapai 100% sehingga masih perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan.

Sasaran 2 : *Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara*

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara*

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
a.	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	80%	80%	100 %
b.	Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	5,6%	5,6%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan capaian sesuai **target** yang telah ditetapkan karena dimana Lembaga Keagamaan yang di Kabupaten Bone berperan aktif dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang sesuai tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi pada tahun 2019 mencapai 80% dari jumlah Lembaga Keagamaan yang ada di Kabupaten Bone.

Adapun realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2019 mencapai 5,6% dari target 5,6 % dari jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pelatihan Bela Negara dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan Baik.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No.	Indikator Kinerja	REALISASI	
		2018	2019
1.	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	79%	80%
2.	Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	4,7%	5,6%

Realisasi pada tahun 2019 mencapai 80% dari target 80%, mengalami kenaikan realisasi dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 79%.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Indikator 1 dari sasaran ke 2 Meningkatnya Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dikarenakan telah diadakan sosialisasi dan monev tentang lembaga keagamaan di kecamatan yang

juga mengalami peningkatan atau dengan kata lain mencapai target. Adapun Indicator ke 2 pada sasaran ke 2 mencapai target disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran ASN untuk mengikuti pelatihan bela Negara.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran dan 2 indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau menghampiri 100%, yaitu sebanyak 2 indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	6	6
<i>Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara</i>	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	100	
	Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	100	100	
		100	100	0

8. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3. Program dan Kegiatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	KEUANGAN
	2	3	4	5	6
1	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	123,600,000	120,600,000	97.57
		Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan	59,000,000	56,000,000	94.92
		Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	64,600,000	64,600,000	100.00
2	Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara	529,587,000	529,486,200	99.98
		Pelatihan Bela Negara	507,887,000	507,836,200	99.99
		Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi Daerah	21,700,000	21,650,000	99.77

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone untuk sasaran strategis kedua telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dimana pencapaian target tahun 2019 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019.

Namun belum dapat dibandingkan dengan target di tahun lalu dikarenakan indikator ini baru pada Renstra 2018-2023.

9. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 2 ini pada indikator 1 sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain masih kurangnya pemahaman organisasi masyarakat keagamaan untuk mendaftarkan lembaga keagamaannya sehingga masih perlu ditingkatkan monev / sosialisasi ke lembaga lembaga yang ada adapun yang ada pada indikator ke 2 masih kurangnya kepedulian ASN tentang pelatihan bela negara.

Sasaran 3 : *Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat*

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat*

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
a.	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani	100%	100%	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada sasaran ke 3 yaitu 1 Indikator 100%, dengan capaian *telah mencapai target* yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2019 mencapai 100%, dari target 100 % dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan Sangat Baik Pada Tahun 2019 jumlah 100%.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi

target pada indikator 1 yaitu Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani capaian *telah mencapai target* yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2019 mencapai 100% dari target 100 % dengan persentase 100% Capaian ini dikategorikan **Baik**. Pada Tahun 2019 jumlah 0 Kejadain..

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 3 : Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani.

Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No.	Indikator Kinerja	REALISASI	
		2018	2019
1.	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani	100%	100%

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100% dari target 100%, tidak mengalami kenaikan realisasi dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) sebesar 100%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Indicator 1 dari sasaran ke 3 Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani telah mengalami keberhasilan dikarenakan telah maksimalnya diadakan rapat – rapat koordinasi dengan FORKOPIMDA, TRIPIKA, KOMINDA, PARPOL, LSM, anggota FKUB, anggota FPK, serta stakeholder terkait yang dapat mendukung dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran dan 1 indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau menghampiri 100%, yaitu sebanyak 1 indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	6	6
<i>Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</i>	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani	100	100	
		100	100	0

d. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3. Program dan Kegiatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI	KEUANGAN
	2	3	4	5	6
1	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3,460,832,240	841,065,650	86.64
		Penyediaan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	464,600,000	399,028,400	80.71
		Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	86,200,000	31,229,000	96.65
		Rakor Polkam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	443,200,000	129,191,250	99.38
		Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial	559,232,240	228,987,000	87.85
		Peningkatan Kerjasama dan Sinergitas Dalam	1,650,400,000	52,630,000	98.61

		Pemeliharaan kantrantibmas			
		Satgas Daerah Sapu Bersih Pungli	257,200,000	841,065,650	86.64

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone untuk sasaran strategis ketiga telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dimana pencapaian target tahun 2019 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019.

Namun belum dapat dibandingkan dengan target di tahun lalu dikarenakan indikator ini baru pada Renstra 2018-2023.

e. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 3 ini pada indikator 1 sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain Belum memadai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA sehingga masih perlu diperhatikan. Solusinya agar pemerintah dapat memfasilitasi untuk pemecahan masalah ini.

a. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.059.489.444 (97%)

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.313.538.370,-(99%)
- Belanja Langsung Rp. 5.745.951.074,-(96%)

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.313.538.370,- (99%) yang diarahkan untuk :

- Gaji dan Tunjangan Rp. 1.620.912.559,-
- 2) Belanja Langsung
- Realisasi anggaran belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.745.951.074,-(96%) dengan jumlah 8 program dan 26 kegiatan.

4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih terdapat penyakit masyarakat (Pekat) antara lain prostitusi, trafficking, penyalahgunaan Narkoba, illegal logging, penggunaan minuman keras (Miras) dan penyakit masyarakat lainnya.
2. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi informasi yang tidak terbendung.
3. Munculnya isu-isu terorisme, munculnya potensi konflik berbasis SARA dan tuntutan pemekaran wilayah.
4. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
5. Belum optimalnya pendidikan politik, peran partai politik dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pengelolaan administrasi partai politik.
6. Sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia yang masih kurang (infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan).
7. Jumlah penegak hukum belum sebanding dengan jumlah penduduk.
8. Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah, karena masih rendahnya pendidikan masyarakat dan belum optimalnya peran Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dalam masyarakat.
9. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.
10. Isu pemekaran wilayah, akan mengurangi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terpecah.

11. Konflik horizontal, terkait dengan penguasaan/kepemilikan lahan antara sebagian penduduk dengan perusahaan.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Mengoptimalkan Pendidikan Politik Masyarakat dengan cara menambah kegiatan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat.
3. Menyusun perencanaan berbasis masyarakat serta memanfaatkan data masyarakat, aktifitasnya dan peran sertanya sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.
4. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke kabupaten/ kota serta Rapat Koordinasi baik di Provinsi maupun di tingkat pusat.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019 adalah baik, karena terdapat 6 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan yang mana semakin kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar pedoman bagi NKRI.

Bagi instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Bone, 28 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Bone

DR. H. A. SUMARDI SUAIB,MM